



2

SURAT IRWASUM POLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

5. Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas tim ..... untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI }  
 SELAKU  
 SEKRETARIS TPKN PUSAT }

Tembusan:


.....  
 .....

1. Kapolri.  
 2. Kapolda .....

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi nama tim sesuai surat perintah;
- 2) diisi dengan peraturan atau surat yang menjadi dasar penerbitan surat laporan;
- 3) diisi dengan uraian langkah-langkah dan hasil pelaksanaan tugas tim;
- 4) diisi dengan bukti atas langkah-langkah dan hasil pelaksanaan tugas tim;
- 5) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas.

## 2. SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KEKURANGAN UANG ATAU BARANG

	CONTOH
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DAERAH .....</b>	
<u>Jalan .....</u>	Jakarta, 20.....
Nomor : B/ / /20 /Itwasda Klasifikasi : Lampiran : Perihal : pemberitahuan terjadinya <u>kekurangan uang/barang.</u>	
	Kepada  Yth. INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SELAKU PENANGGUNG- JAWAB TPKN PUSAT)  di  <u>Jakarta</u>
1. Rujukan ..... 1)	
2. Bersama ini diberitahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan Kaurkeu/pegawai negeri/pihak ketiga*) a.n. .... NRP/NIP ..... jabatan ..... 2) yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp. .... (..... dengan huruf). 3)	
3. Selanjutnya diberitahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil, adalah:	
a. ....; } b. .... } 4)	
4. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini dilampirkan:	
a. berita acara pemeriksaan kas/fisik barang; b. register penutupan kas; c. perhitungan yang dibuat Kaurkeu sebagai pertanggungjawaban; d. fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; dan e. dan lain-lain (berkaitan dengan kasus).	

2

SURAT KAPOLDA .....  
NOMOR : 20..  
TANGGAL: 20..

5. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
 IRWASDA  
 SELAKU  
 WAKIL KETUA TPKN POLDA }<sup>5)</sup>

Tembusan:


.....  
 .....

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) \*) coret yang tidak perlu.
- 2) diisi nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 3) diisi dengan nilai besar kekurangan uang/barang dalam bentuk rupiah.
- 4) diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain penyegelan brankas, penutupan buku kas umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan berita acara penutupan kas dan register penutupan kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 5) diisi dengan nama, pangkat dan NRP Kasatker tempat terjadinya kerugian negara.

## a. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENUTUPAN BUKU KAS/GUDANG BMN

<u>KOPSIUK</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">CONTOH</div>
	
<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENUTUPAN</b> <b>BUKU KAS/GUDANG *)</b>	
Nomor: BA/...../...../..... *)	
<p>Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dengan huruf ..... di ..... s/ kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
<p>1.    nama                    : .....; }              pangkat/NRP        : .....; } 4)              jabatan                : .....; }</p> <p>      yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama.</p>	
<p>2.    nama                    : .....; }              pangkat/NRP        : .....; } 5)              jabatan                : .....; }</p> <p>      yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua.</p>	
<p>Menyatakan:</p>	
<p>1. Pihak Pertama menyerahkan buku-buku kas pengelolaan keuangan negara/barang kekayaan milik negara*) untuk dilakukan pemeriksaan dan penutupan buku kas/gudang BMN*).</p>	
<p>2. Pihak Kedua menerima buku-buku berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/ Barang Kekayaan milik negara*) untuk memeriksa dan menutup buku kas/gudang BMN*).</p>	
<p>3. Terhitung mulai saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penutupan buku-buku kas (buku kas pembantu dan buku kas umum) pengelolaan keuangan negara/barang kekayaan milik negara*), pihak pertama dilarang melakukan pengeluaran uang/barang*).</p>	
<p>4. hasil pemeriksaan oleh pihak kedua, pihak pertama telah melakukan tindakan yang berakibat terjadinya kerugian negara sebesar Rp. ....6) (..... Dalam huruf .....), sebagai berikut:</p>	
<p>a. .... berdasarkan bukti nomor .... (terlampir);          b. .... berdasarkan bukti nomor .... (terlampir);          c. .... berdasarkan bukti nomor .... (terlampir); dan } 7)          d. .... berdasarkan bukti nomor .... (terlampir).</p>	

2

BERITA ACARA .....  
NOMOR : BA/...../...../20...  
TANGGAL: 20..

5. Berita acara pemeriksaan dan penutupan buku-buku kas/gudang\*) ini dibuat dan ditandatangani di ..... 8) pada hari dan tanggal tersebut di atas.
6. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
 IRWASDA  
 SELAKU  
 WAKIL KETUA TPKN POLDA

}  
 9)

Tembusan:


.....  
 .....

1. Kapolri.
2. Wakapolri.

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) \*) coret yang tidak perlu;
- 2) diisi dengan nomor Berita Acara;
- 3) diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya berita acara;
- 4) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara;
- 5) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan pemeriksaan dan penutupan;
- 6) diisi dengan nilai jumlah kerugian Negara;
- 7) diisi dengan uraian kejadian kerugian negara dengan menyebutkan bukti-bukti terlampir, dan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan buku kas umum, dan buku-buku pembantu;
- 8) diisi dengan nama kota ditandatanganinya Berita Acara; dan
- 9) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas.

b. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HARTA KEKAYAAN MILIK PELAKU KERUGIAN NEGARA

<u>KOP SURAT</u>	CONTOH
 <p style="text-align: center;"><b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HARTA KEKAYAAN MILIK PELAKU KERUGIAN NEGARA</b> Nomor: BA/...../...../..... "</p>	
<p>Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (dengan huruf di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 2)</p> <p>1.    nama                : .....; }              pangkat/NRP : .....; } 4)              jabatan            : .....; }</p> <p style="padding-left: 40px;">yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama.</p> <p>2.    nama                : .....; }              pangkat/NRP : .....; } 5)              jabatan            : .....; }</p> <p style="padding-left: 40px;">yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua.</p> <p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Kesatu menyerahkan daftar dan menunjukkan bukti harta kekayaan miliknya serta difotokopi untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh pihak kedua.</li> <li>2. Pihak Kedua menerima daftar dan melihat bukti serta menerima foto kopi harta kekayaan a.n. ...., Pangkat/NRP ..... Jabatan ..... untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan. 5)</li> <li>3. Terhitung mulai saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian harta kekayaan a.n. ...., Pangkat/NRP ..... Jabatan ..... tidak dapat diperjualbelikan sampai ada keputusan laporan penyelesaian kerugian negara. 6)</li> <li>4. Berita acara Pemeriksaan dan Penutupan buku-buku kas/gudang*) ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. 7)</li> </ol>	

2

BERITA ACARA .....  
 NOMOR : BA/ / /20...  
 TANGGAL: 20..

5. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
 IRWASDA  
 SELAKU  
 WAKIL KETUA TPKN POLDA

} 8)

Tembusan:

.....  
 .....

1. Kapolri.
2. Wakapolri.

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi dengan nomor berita acara.
- 2) diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya berita acara.
- 3) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 4) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan pemeriksaan dan menilai harta kekayaan subjek.
- 5) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 6) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 7) diisi dengan nama kota ditandatanganinya berita acara ini.
- 8) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas.



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HARTA KEKAYAAN  
MILIK PELAKU KERUGIAN NEGARA

KOPSTUK

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : BA/ / /20...

TANGGAL: 20...

**DAFTAR HARTA KEKAYAAN**  
**A.N. ....PANGKAT/NRP ..... JABATAN .....**

<b>NO</b>	<b>HARTA KEKAYAAN</b>	<b>BUKTI</b>	<b>NILAI SATUAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>KET *)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Jakarta, ..... 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
IRWASDA  
SELAKU  
WAKIL KETUA TPKN POLDA

.....  
.....


**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi dengan nomor urut.
- 2) diisi dengan jenis harta kekayaan SUBJEK.
- 3) diisi dengan bukti kepemilikan atas harta kekayaan SUBJEK.
- 4) diisi dengan harga satuan harta kekayaan SUBJEK setiap jenisnya.
- 5) diisi dengan jumlah nilai harta kekayaan SUBJEK setiap jenisnya.
- 6) diisi dengan keterangan untuk menjelaskan hal-hal berkaitan dengan harta kekayaan pelaku kerugian negara.

## 3. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOPSTUK SURAT	CONTOH
<b>SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama : .....	} 1)
NRP/NIP : .....	
pangkat/golongan : .....	
tempat/tanggal lahir : .....	
alamat : .....	
No. & Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/Jabatan: .....	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan:..... } 2)	
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di .....dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3) Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual, sebagai berikut:	
1. ....;	} 4)
2. ....;	
3. ....	
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.	
Mengetahui:	..... } 5)
Kepala .....(Satuan Organisasi) 6)	meterai cukup (Nama Bendahara) .....
Saksi-Saksi:	
1. ....	} 7)
2. ....	
*) coret yang tidak perlu	
<b>Petunjuk Pengisian:</b>	
1) diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.	
2) diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.	
3) diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.	
4) diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.	
5) diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.	
6) diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.	
7) diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.	

- a. SURAT PERSETUJUAN REALISASI PELAKSANAAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	037011														
<p><b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>MARKAS BESAR</b>  <u>Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110</u>      Jakarta,      20... 1)</p>															
<p>Nomor : B/ ..... /..... /20...../Itwasum 2)          Klasifikasi:          Lampiran :          Perihal : <u>persetujuan realisasi pelaksanaan Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak.</u>      Kepada</p>															
<p>Yth. KEPALA BADAN          PEMERIKSA          KEUANGAN REPUBLIK          INDONESIA</p> <p>di</p> <p><u>Jakarta</u></p>															
<p>1. Rujukan ..... 3)</p> <p>2. Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pelaku kerugian negara yaitu:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">nama</td> <td style="width: 40%;">: .....</td> <td rowspan="6" style="width: 20%; vertical-align: middle; font-size: 3em;">}</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">4)</td> </tr> <tr> <td>NRP/NIP</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>pangkat/golongan</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>tempat/tanggal lahir</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>alamat</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>No. &amp; Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan</td> <td>: .....</td> </tr> </table> <p>Telah melaksanakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dengan membayar kerugian negara sebesar Rp. ....,- (.....<i>dengan huruf</i> .....)<sup>5)</sup> ke kas negara bukti setor terlampir sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.</p> <p>3. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan.</p>		nama	: .....	}	4)	NRP/NIP	: .....	pangkat/golongan	: .....	tempat/tanggal lahir	: .....	alamat	: .....	No. & Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan	: .....
nama	: .....	}	4)												
NRP/NIP	: .....														
pangkat/golongan	: .....														
tempat/tanggal lahir	: .....														
alamat	: .....														
No. & Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan	: .....														
<p>a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA          IRWASUM          SELAKU          SEKRETARIS TPKN PUSAT</p>															
<p>Tembusan:      .....</p> <p>1. Kapolri.          2. Wakapolri.</p>															

2

SURAT KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat diterbitkan.
- 2) diisi dengan nomor, klasifikasi dan jumlah lampiran surat.
- 3) diisi dengan nama, NRP/NIP, dan jabatan Kaurkeu atau pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 4) diisi dengan nilai besar kekurangan uang/barang dalam bentuk rupiah.
- 5) diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan buku kas umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan berita acara penutupan kas dan register penutupan kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 6) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas.

- b. SURAT KUASA UNTUK MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

<b>CONTOH</b>																				
<p><b>SURAT KUASA UNTUK MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>																				
<p>1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">nama</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">.....;</td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-left: 10px;">}</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;">1)</td> </tr> <tr> <td>NRP/NIP</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>pangkat/golongan</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>tempat/tanggal lahir</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>No. &amp; Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> </table> <p>yang selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama).</p>	nama	:	.....;	}	1)	NRP/NIP	:	.....;	pangkat/golongan	:	.....;	tempat/tanggal lahir	:	.....;	Alamat	:	.....;	No. & Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan	:	.....;
nama	:	.....;	}			1)														
NRP/NIP	:	.....;																		
pangkat/golongan	:	.....;																		
tempat/tanggal lahir	:	.....;																		
Alamat	:	.....;																		
No. & Tgl SK pengangkatan sebagai Kaurkeu/jabatan	:	.....;																		
<p>2. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">nama</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">.....;</td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-left: 10px;">}</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;">2)</td> </tr> <tr> <td>NRP/NIP</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>pangkat/golongan</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>tempat/tanggal lahir</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>alamat</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> <tr> <td>No. &amp; Tgl SK jabatan</td> <td>:</td> <td>.....;</td> </tr> </table> <p>yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).</p>	nama	:	.....;	}	2)	NRP/NIP	:	.....;	pangkat/golongan	:	.....;	tempat/tanggal lahir	:	.....;	alamat	:	.....;	No. & Tgl SK jabatan	:	.....;
nama	:	.....;	}			2)														
NRP/NIP	:	.....;																		
pangkat/golongan	:	.....;																		
tempat/tanggal lahir	:	.....;																		
alamat	:	.....;																		
No. & Tgl SK jabatan	:	.....;																		
<p>3. Pihak I (pertama) memberikan kuasa kepada pihak II (kedua) untuk melakukan penjualan dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain milik pihak I (pertama) untuk melunasi kerugian negara/kekurangan kerugian negara akibat melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara untuk disetor ke kas negara sebesar Rp. ....,- (.....<i>dengan huruf</i>.....) 3).</p>																				
<p>4. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">Ditetapkan di ....., ... .. 20.... 4)</p>																				
<p><u>Saksi:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. .... 6)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2. .... 7)</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Dinyatakan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-left: 10px;">}</p> <p style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;">5)</p> </div>	1. .... 6)		2. .... 7)																	
1. .... 6)																				
2. .... 7)																				


**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi dengan nama, NRP, pangkat/golongan, Tempat/Tanggal lahir, alamat, No. & Tgl SK Jabatan pelaku kerugian negara
- 2) diisi dengan nama, NRP, pangkat/golongan, Tempat/Tanggal lahir, alamat, No. & Tgl SK Jabatan pejabat yang diberi kuasa untuk menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sesuai ketentuan.
- 3) diisi dengan jumlah pelunasan kerugian negara yang harus dibayarkan.
- 4) diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun surat kuasa dibuat.
- 5) diisi dengan nama yang membuat surat kuasa.
- 6) diisi dengan nama dan jabatan saksi pertama surat pernyataan.
- 7) diisi dengan nama dan jabatan saksi kedua surat pernyataan.

- c. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA (SPBMKN)

<b>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA</b>		CONTOH			
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini saya .....nama.....<sup>1)</sup> anak .....<sup>2)</sup> dari ahli waris a.n. ....<sup>3)</sup> yang meninggal dunia pada tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.....<sup>4)</sup> di alamat .....<sup>5)</sup> menyatakan dalam keadaan sehat wal'afiat dan dengan sesungguhnya bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh .....nama.....<sup>1)</sup> bapak/ibu*) saya sebesar Rp. ....<sup>6)</sup> secara angsur sebesar Rp. ....,-/bulan <sup>7)</sup> selama ..... bulan <sup>8)</sup> atau tunai sebesar Rp. ....<sup>6)</sup></p> <p>Apabila saya lalai membayar ganti kerugian negara tersebut, maka harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai jaminan untuk mengganti kerugian negara dapat direalisasikan untuk dijual dan/atau dicairkan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di ....., ... .. 20....<sup>9)</sup></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <p><u>Saksi:</u></p> <p>1. ....<sup>10)</sup></p> <p>2. ....<sup>11)</sup></p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; text-align: center;"> <p>Dinyatakan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </td> <td style="width: 5%; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>} 12)</p> </td> </tr> </table>			<p><u>Saksi:</u></p> <p>1. ....<sup>10)</sup></p> <p>2. ....<sup>11)</sup></p>	<p>Dinyatakan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>} 12)</p>
<p><u>Saksi:</u></p> <p>1. ....<sup>10)</sup></p> <p>2. ....<sup>11)</sup></p>	<p>Dinyatakan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>} 12)</p>			
<p><b>Petunjuk Pengisian:</b></p> <p>*) coret yang tidak perlu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diisi dengan nama, umur, alamat, pekerjaan ahli waris yang bersedia mengganti kerugian negara.</li> <li>2) diisi dengan status ahli waris yang bersedia mengganti kerugian negara.</li> <li>3) diisi dengan nama pelaku kerugian negara.</li> <li>4) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaku kerugian negara meninggal.</li> <li>5) diisi dengan alamat pelaku kerugian negara meninggal.</li> <li>6) diisi dengan jumlah kerugian negara.</li> <li>7) diisi dengan jumlah angsuran yang dibayarkan untuk melunasi kerugian negara setiap bulan.</li> <li>8) diisi dengan jumlah bulan untuk melunasi kerugian negara.</li> <li>9) diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.</li> <li>10) diisi dengan nama dan jabatan saksi pertama surat pernyataan.</li> <li>11) diisi dengan nama dan jabatan saksi kedua surat pernyataan.</li> <li>12) diisi dengan nama yang membuat surat pernyataan.</li> </ol>					

## 4. SURAT PERINTAH PEMOTONGAN GAJI

<u>KO-STUK</u>	CONTOH
	
<p><b><u>SURAT PERINTAH PEMOTONGAN GAJI</u></b>          Nomor: Sprin/ / / 20.....</p>	
Pertimbangan	: bahwa terdapat bukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota Polri selaku Kaurkeu/pegawai Polri, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp ..... (..... dengan huruf .....) <sup>1)</sup> dipandang perlu mengeluarkan surat perintah pemotongan gaji yang bersifat sebagai pembebanan sementara.
Dasar	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan Kaurkeu yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan;  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu: a) Pasal 59 ayat 1 bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan b) Pasal 59 ayat 2 bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.
Mempertimbangkan:	1. hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan .....; <sup>2)</sup>  2: Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak ditandatangani pelaku kerugian negara.
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: nama : .....; } pangkat/NRP/NIP : .....; } jabatan : .....; } <sup>3)</sup> Satker : .....; }




2	SURAT PERINTAH ..... <u>NOMOR : 20..</u> <u>TANGGAL: 20..</u>
Untuk	: 1. melaksanakan pemotongan gaji dari pelaku kerugian negara: nama : ..... pangkat/NRP/NIP: ..... jabatan : ..... Satker : ..... } <sup>4)</sup>  setiap bulan sebesar Rp. .... (.....dengan huruf..... dimulai bulan ... 20 ... s.d. bulan ..... 20.....; <sup>5)</sup>  2. menyetorkan hasil pemotongan gaji ke kas negara dan mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;  4. melaporkan perintah ini kepada Kasatker.
Selesai.	Dikeluarkan di : ..... pada tanggal : ..... <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">           KASATKER }            NAMA }<sup>6)</sup>            PANGKAT/NRP }         </div>
Tembusan:  1. Irwasum Polri. 2. Kasatker. 3. Irwasda Polda .... 4. Kapuskeu/kabidkeu Polda ..... 5. Kaurkeu Satker .... 6. Pelaku.	} <sup>7)</sup>
<b>Petunjuk Pengisian:</b> 1) diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi. 2) diisi dengan informasi kerugian negara terjadi. 3) diisi dengan identitas Kaurkeu Satker/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji pelaku kerugian negara. 4) diisi dengan identitas pelaku kerugian negara. 5) diisi dengan jumlah pemotongan gaji dan mulai serta berakhirnya pemotongan. 6) diisi Satker dan nama, pangkat dan NRP Kasatker dimana kerugian negara terjadi. 7) diisi dengan jabatan Satker dimana kerugian negara terjadi.	



**Petunjuk Pengisian:**

- \*) coret yang tidak perlu
- 1) diisi dengan nama pelaku kerugian negara.
- 2) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaku kerugian negara meninggal.
- 3) diisi dengan alamat pelaku kerugian negara.
- 4) diisi dengan nama suami atau istri pelaku kerugian negara.
- 5) diisi dengan jumlah anak hasil perkawinan pelaku kerugian negara.
- 6) diisi dengan umur suami atau istri pelaku kerugian negara.
- 7) diisi dengan nama anak pertama pelaku kerugian negara.
- 8) diisi dengan umur anak pertama pelaku kerugian negara.
- 9) diisi dengan alamat anak pertama pelaku kerugian negara.
- 10) diisi dengan nama anak kedua pelaku kerugian negara.
- 11) diisi dengan umur anak kedua pelaku kerugian negara.
- 12) diisi dengan alamat anak kedua pelaku kerugian negara.
- 13) diisi dengan nama anak pelaku kerugian negara yang bertanggung jawab menanggung kerugian negara pelaku kerugian negara.
- 14) diisi dengan Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
- 15) diisi dengan nomor surat keterangan ahli waris/pengampu.
- 16) diisi dengan tanggal surat keterangan ahli waris/pengampu
- 17) diisi dengan nama dan jabatan yang membuat surat pernyataan.

## 6. KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KOPSTUK		CONTOH									
<p><b><u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u></b>          Nomor: Kep/ / /20... 1)          tentang  <b><u>PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA</u></b></p>											
<p><b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b></p>											
<p>Menimbang : 1. ....; dst          2. ....; dst</p>											
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat 1 setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan Kaurkeu yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan;          2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:              a. Pasal 59 ayat 1 bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan              b. Pasal 59 ayat 2 bahwa Kaurkeu, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.</p>											
<p>MEMUTUSKAN</p>											
<p>Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA.</p>											
<p>1. Mendahului Keputusan Pembebanan terhadap Ganti Rugi dari Kapolri/BPK RI*), menetapkan Pembebanan Sementara ganti rugi kepada:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">nama</td> <td style="width: 20%;">: .....</td> <td rowspan="4" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">} 2)</td> </tr> <tr> <td>pangkat/NRP/NIP</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>jabatan</td> <td>: .....</td> </tr> <tr> <td>Satker</td> <td>: .....</td> </tr> </table>			nama	: .....	} 2)	pangkat/NRP/NIP	: .....	jabatan	: .....	Satker	: .....
nama	: .....	} 2)									
pangkat/NRP/NIP	: .....										
jabatan	: .....										
Satker	: .....										

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

2. jumlah Pembebanan Sementara Ganti Rugi sebesar Rp. ... (... dengan huruf .....)<sup>3)</sup>
3. Kaurkeu .....<sup>4)</sup> sebagai Urkeu yang ditunjuk berdasarkan pemungutan jumlah pembebanan kerugian negara yang masih terhutang sampai lunas dan oleh karena itu Kaurkeu harus mengadministrasikan ke dalam pembukuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Kapolri.
  2. Ketua BPK RI.
  3. Irwasum Polri.
  4. Wakapolda .....
  5. Irwasda Polda .....
  6. Kasatker
  7. Kaurkeu
- } <sup>4)</sup>

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan (pelaku kerugian negara) untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : .....


a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
WAKA  
SELAKU KETUA TPKN PUSAT

NAMA  
PANGKAT

**Petunjuk Pengisian:**

- \*) coret yang tidak perlu
- 1) diisi dengan nomor dan tahun Keputusan Kapolri tentang Pembebanan Sementara kerugian negara yang terjadi.
  - 2) diisi dengan identitas pelaku kerugian negara.
  - 3) diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi.
  - 4) diisi dengan jabatan tempat kerugian negara terjadi

## 8. KEPUTUSAN PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

<u>KOPSTUK</u>		<u>CONTOH</u>
<b><u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u></b>		
Nomor: Kep/        /        /20.....		
tentang		
<b><u>PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN</u></b>		
<b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>		
Menimbang	: 1. ....;	} 1)
	2. ....;	
	3. ....;	
Mengingat	: 1. ....;	} 2)
	2. ....;	
	3. ....;	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN	
	1. menyatakan bahwa saudara ..... Bendahara/mantan Bendahara/Pegawai Negeri Polri*) pada .....(unit kerja dan Instansi) ..... Di ..... bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp. .... (..... dengan huruf..... <sup>3</sup> ) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;	
	2. memberi kesempatan kepada saudara ..... <sup>4</sup> ) untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima keputusan ini;	
	3. apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara, Tim Penyelesaian Kerugian negara tingkat pusat segera menerbitkan Keputusan Pembebanan;	

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : .....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

WAKIL KETUA

(.....Nama Wakil Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

5)

Kepada Yth:

1. ....

2. ....

3. .... (nama pelaku kerugian negara) }<sup>6)</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

\*) coret yang tidak perlu

1) diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.

2) diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.


3) diisi dengan nama pelaku kerugian negara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara.

4) diisi dengan nama pelaku kerugian.

5) diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Kerugian Negara.

6) diisi dengan nama-nama Instansi atau Satker yang terkait dan nama pelaku kerugian negara.

## 8. KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

<u>KOPSTUK</u>		007011
<b><u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u></b>		
Nomor: Kep /        /        /20.....		
tentang		
<b><u>PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA</u></b>		
<b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>		
Menimbang	: 1. ....;	} 1)
	2. ....;	
	3. ....;	
Mengingat	: 1. ....;	} 2)
	2. ....;	
	3. ....;	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	: <b>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA</b>	
	1. menyatakan bahwa saudara....., NIP. ...., Pegawai Negeri Polri pada ..... (satuan fungsi/satuan kerja) ..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelainan sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. .... (..... Dengan huruf.....); 3)	
	2. saudara ..... 4) diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas negara/daerah*) melalui..... NRP/NIP*)..... selaku bendahara..... (Satfung/Satker)..... 5)	



2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : .....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

WAKIL KETUA

(.....Nama Wakil Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

6)

Kepada Yth:

1. ....
2. ....
3. .... (nama pelaku kerugian negara) }<sup>7)</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

- \*) coret yang tidak perlu
- 1) diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
  - 2) diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  - 3) diisi dengan nama pelaku kerugian negara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara.
  - 4) diisi dengan nama pelaku kerugian.
  - 5) diisi dengan nama, jabatan dan NRP/NIP bendahara yang ditunjuk untuk menerima pembayaran kerugian negara dari pelaku untuk disetorkan ke kas negara.
  - 6) diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Kerugian Negara.
  - 7) diisi dengan nama-nama Instansi atau Satker yang terkait dan nama pelaku kerugian negara.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

KOPSTUK

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : 20..

TANGGAL: 20..

**DAFTAR KERUGIAN NEGARA**

NO	NAMA KAUR KEU	NO/TGL/ SKTJM /SK PEMBEBANAN SEMENTARA /SK PEMBEBANAN	URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KE- RUGIAN NEGARA (RP)	JUMLAH PEMBAYARAN /ANGSURAN S.D. BULAN ..... (RP)	SISA KERUGIAN (RP)	JENIS DAN JML BARANG JAMINAN	KET (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....<sup>10)</sup>


a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
IRWASUM  
SELAKU  
SEKRETARIS TPKN PUSAT

.....  
.....  
.....<sup>11)</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) diisi dengan nomor urut.
- 2) diisi nama, NRP/NIP, dan jabatan SUBJEK yaitu Kaurkeu/Pejabat yang telah melakukan kerugian negara.
- 3) diisi dengan nomor dan tanggal SKTJM/SK pembebanan sementara/SK pembebanan.
- 4) diisi dengan uraian kasus dan tahun kejadian.
- 5) diisi dengan jumlah kerugian Negara (dalam rupiah).
- 6) diisi dengan jumlah pembayaran yang telah disetor kekas Negara dari Kaurkeu/Pejabat yang melakukan kerugian negara.
- 7) diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) diisi dengan jenis dan jumlah jaminan yang ada (bila ada).
- 9) diisi dengan:
  - a. Pelaksanaan SKTJM Negara lunas, tunai atau melalui penjualan barang;
  - b. Pelaksanaan SK pembebanan sementara, Negara telah/belum dilaksanakan sita jaminan;
  - c. Pelaksanaan SK pembebanan, tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*)
- 10) diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat.
- 11) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas.

## 9. LAPORAN HASIL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

		CONTOH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR		
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110		Jakarta, 20.....
Nomor : B/ ..... /..... /20...../Itwasum		
Klasifikasi:		
Lampiran :		
Perihal : <u>laporan hasil penyelesaian kerugian negara.</u>		Kepada
		Yth. KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
		di
		<u>Jakarta</u>
1. Rujukan:		
a. ....;		
b. .... } <sup>2)</sup>		
2. Bersama ini kami laporkan bahwa kerugian negara yang dilakukan oleh Kaurkeu/pegawai negeri/ pihak ketiga*) a.n. .... NRP./NIP. .... jabatan ....., sebesar Rp. .... (..... dengan huruf .....) 3) telah lunas berdasarkan bukti setor ke kas negara terlampir.		
3. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Kaurkeu yang bersangkutan		
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA IRWASUM SELAKU SEKRETARIS TPKN PUSAT		}
Tembusan:		} <sup>6)</sup>
1. Kapolri.		
2. <u>Wakapolri.</u>		
<b>Petunjuk Pengisian:</b>		
*) coret yang tidak perlu.		
1) diisi dengan peraturan atau surat yang menjadi dasar penerbitan surat laporan.		
2) diisi dengan nama, NRP/NIP dan jabatan pelaku kerugian negara dan jumlah kerugian negara dalam rupiah.		
3) diisi dengan nama, pangkat dan NRP pejabat berwenang menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas menyelesaikan kerugian negara.		

## 10. KEPUTUSAN PENCATATAN

KOPSTUK

CONTOH

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: Kep/ / /20.....

tentang

**PENCATATAN KERUGIAN NEGARA****KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. ....; }  
 2. ....; }  
 3. ....; } 1)

Mengingat : 1. ....; }  
 2. ....; } 2)  
 3. ....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCATATAN KERUGIAN NEGARA**

1. mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saudara ....., pegawai negeri Polri pada ..... (nama Satker/Satfung) sebesar Rp. .... (.....dengan huruf.....); 3)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penuntutan apabila di kemudian hari keberadaan mantan pejabat pegawai negeri tersebut pada Diktum PERTAMA diketahui.
3. apabila dalam jangka waktu 30 tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menerbitkan Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan pejabat pegawai negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut;

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : .....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

WAKIL KETUA

(.....Nama Wakil Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

}<sup>5)</sup>

Kepada Yth:

1. ....

2. ....

3. .... (nama pelaku kerugian negara) }<sup>6)</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

\*) coret yang tidak perlu

1) diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.


2) diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3) diisi dengan nama NRP/NIP dan jabatan pelaku kerugian negara kerugian negara serta jumlah kerugian negara.

4) diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Kerugian Negara.

5) diisi dengan nama-nama Instansi atau Satker yang terkait dan nama pelaku kerugian negara.

## 11. KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KOPSTUK	CONTOH
	
<p><b>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>          Nomor: Kcp/ / /20.....</p>	
tentang	
<p><b>PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA .....</b> 1)</p>	
<p><b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b></p>	
Menimbang :	1. ....; } 2. ....; } 2) 3. ....; }
Mengingat :	1. ....; } 2. ....; } 3) 3. ....; }
MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	<p><b>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terdapat kerugian negara sebesar Rp. .... (..... dengan huruf.....) yang terjadi dalam pengurusan saudara ..... NRP/NIP*)....., pada saat itu selaku pegawai negeri Polri pada ..... (nama Satker/Satfung) 4)</li> <li>saudara ..... NRP/NIP*) .....<sup>5)</sup> tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi.</li> </ol>

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : 20..TANGGAL: 20..

3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : .....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MAJELIS TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

WAKIL KETUA

(.....Nama Wakil Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

}<sup>6)</sup>

Kepada Yth:

1. ....

2. ....

3. .... (nama pelaku kerugian negara) }<sup>7)</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

\*) coret yang tidak perlu

1) diisi dengan nama pelaku kerugian negara

2) diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.

3) diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

4) diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi, nama, NRP/Nip dan jabatan pelaku kerugian negara kerugian negara.

5) diisi dengan nama NRP/Nip dan jabatan pelaku kerugian negara kerugian negara.

6) diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Kerugian Negara.

7) diisi dengan nama-nama Instansi atau Satker yang terkait dan nama pelaku kerugian negara.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO  
JENDERAL POLISI